

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia saat ini sedang memasuki era penting untuk memperkuat eksistensinya baik di regional maupun internasional. Pengembangan kualitas pembangunan menjadi salah satu langkah utama yang diambil oleh pemerintah agar Indonesia dapat meningkatkan eksistensinya tersebut. Pembangunan manusia memiliki tujuan utama yaitu menitik beratkan pada pembangunan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia merupakan fokus utama dalam pembangunan. Untuk memaksimalkan pembangunan, Indonesia membutuhkan masyarakat yang unggul dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu negara dan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan dari proses pembangunan suatu negara.

Dengan dasar dan sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah. Setiap program pembangunan selalu berfokus pada manusia hal ini sejalan dengan model pembangunan yang dikembangkan sejak tahun 1990-an, terutama yang berpusat pada masyarakat. Secara konseptual, pembangunan manusia adalah upaya untuk memberi orang lebih banyak kesempatan untuk menjalani kehidupan yang layak, biasanya melalui peningkatan kemampuan dasar dan daya beli mereka. Dari segi praktis,

penguatan kapasitas dasar adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan status kesehatan mereka (Widodo et al., 2011).

Pembangunan merupakan syarat mutlak bagi eksistensi suatu negara, setiap negara harus berusaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan agar masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang mendukung kehidupan yang sehat, panjang umur, dan produktif. Peningkatan kemampuan dasar masyarakat untuk meningkatkan peluang mereka berpartisipasi dalam proses pembangunan yang dikenal sebagai pengembangan sumber daya manusia. Istilah "pengembangan sumber daya manusia" mengacu pada jumlah modal yang dikeluarkan pada saat pelaksanaan pembangunan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sehingga mereka dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dengan tingginya tingkat pendapatan akan menghasilkan peningkatan konsumsi di masa depan.

Pada tahun 1990 *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan "*Human Development Index (HDI)*" atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), salah satu data yang di gunakan negara untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan beberapa komponen dasar kualitas hidup adalah indeks pembangunan manusia (Kahar, 2018). IPM terdiri atas tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*along and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator dari dimensi umur panjang dan hidup sehat. Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan jumlah tahun yang

diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk mampu bertahan hidup . Rata rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah merupakan indikator dari dimensi pengetahuan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan rata-rata lamanya (tahun) pendidikan formal yang ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dijabarkan sebagai lamanya (tahun) pendidikan formal yang diharapkan akan ditempuh oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang, standar hidup layak diukur dari nilai pengeluaran perkapita dan disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP=*Purchasing Power Parity*).

**Tabel 1.1**

**Perbandingan Komponen Penyusun IPM di Beberapa Negara ASEAN Tahun 2018-2021 (tahun)**

<b>Negara</b>	<b>Tahun</b>	<b>Usia Harapan Hidup</b>	<b>Harapan Lama Sekolah</b>	<b>Rata-Rata Lama Sekolah</b>
<b>Singapura</b>	2018	83.5	16.5	11.7
	2019	83.8	16.5	11.9
	2020	82.9	16.5	11.9
	2021	82.8	16.5	11.9
<b>Malaysia</b>	2018	75.6	13.5	10.6
	2019	75.8	13.5	10.6
	2020	75.9	13.3	10.6
	2021	74.9	13.3	10.6
<b>Indonesia</b>	2018	70.4	13.6	8.2
	2019	70.5	13.7	8.4
	2020	68.8	13.7	8.6
	2021	67.6	13.7	8.6
<b>Thailand</b>	2018	78.7	15.7	8.4
	2019	79.0	15.9	8.7
	2020	79.3	15.9	8.7
	2021	78.7	15.9	8.7

Sumber : UNDP, *Human Development Report*. Diolah

*United Nations Development Programme (UNDP)* merilis data komponen penyusun ipm yaitu usia harapan hidup, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di setiap negara. Jika dilihat pada tabel 1.1 angka usia harapan hidup Indonesia tercatat terus mengalami penurunan, pada tahun 2018-2021 mengalami penurunan signifikan yaitu sebesar 2.8 tahun. UNDP mencatat, bahwa nilai usia harapan hidup Indonesia menempati urutan terendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Jika komponen penyusun ipm yaitu usia harapan hidup masih rendah maka akan mempengaruhi nilai ipm, untuk nilai ipm Indonesia masih dikategorikan sebagai kategori *high human development* , apabila ipm indonesia ingin termasuk ke dalam kategori *very high human development* maka pemerintah harus memperhatikan komponen komponen penyusunan indeks pembangunan manusia itu sendiri.

*Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* merupakan organisasi kawasan yang berdiri sejak tahun 1967 dan menghimpun kerja sama antar negara-negara di Asia Tenggara. Anggota ASEAN terdapat 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Myanmar, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Laos, Thailand, Kamboja dan Vietnam. Organisasi ini didirikan berdasarkan keinginan yang sama yaitu menciptakan kawasan yang damai. ASEAN memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan serta penghidupan masyarakat dengan memfasilitasi akses yang adil terhadap kesempatan pembangunan manusia. Ipm merupakan salah satu hal yang mendasari pembangunan untuk mencapai kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan ipm juga memberi wawasan pembangunan yang lebih luas karena di desain untuk memfokuskan perhatian pada

aspek pembangunan yaitu bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga bisa mengetahui perbandingan kinerja pembangunan manusia antar negara maupun antar daerah.



**Gambar 1.1**

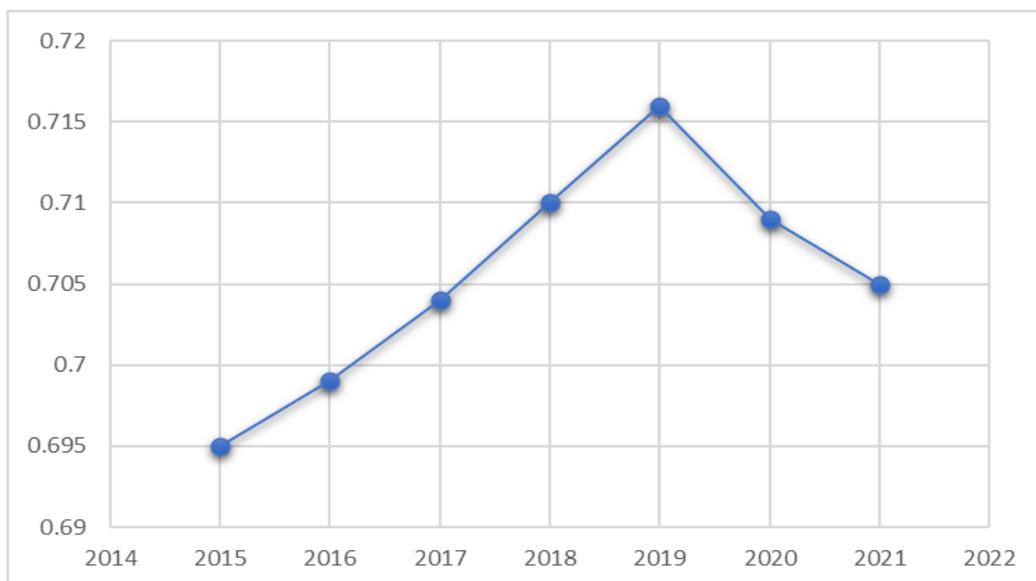
**Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Dengan Beberapa Negara ASEAN Tahun 2019-2021 (persen)**

*Sumber: UNDP, Human Development Report. Diolah.*

Bisa dilihat pada gambar 1.1 indeks pembangunan manusia di beberapa negara ASEAN menunjukkan bahwa nilai ipm Indonesia menempati posisi paling rendah dibandingkan negara Singapura, Malaysia dan Thailand, angka ipm Indonesia terus mengalami penurunan pada tahun 2019-2021 sebesar 0.011 hal tersebut dialami juga oleh negara Singapura dan Thailand yang mana pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan akan tetapi penurunannya bisa terbilang kecil yaitu hanya sebesar 0.004, negara Malaysia juga mengalami penurunan tetapi masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan penurunan yang dialami oleh Indonesia, negara Malaysia mengalami penurunan sebesar 0.007 pada 2019-2021,

negara Indonesia juga belum mencapai nilai IPM yang ditetapkan dunia yaitu sebesar 0.732 pada tahun 2021 sedangkan Indonesia hanya sebesar 0.705.

Nilai ipm dijadikan tolak ukur perbandingan kinerja pembangunan di setiap negara. Kinerja pembangunan Indonesia belum optimal karena belum mampu menembus peringkat ke 100 besar di dunia, untuk mengetahui perkembangan ipm Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.2. Pada tahun 2022 IPM Indonesia berada pada peringkat 114 dari 191 negara. Indonesia berada pada peringkat ke 6 di antara negara ASEAN lainnya, Indonesia masih dibawah negara Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina tetapi masih di atas peringkat negara Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja.



**Gambar 1.2**

**Perkembangan IPM Indonesia Tahun 2015-2021 (persen)**

*Sumber : UNDP. Human Development Report. Diolah*

Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan indeks pembangunan manusia di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun mulai dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 0.021% akan tetapi pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan sebesar

0.011%, perkembangan 0.021% pada tahun 2015-2019 tersebut merupakan hal yang positif bagi negara Indonesia dalam pembangunan sumber daya manusia. Akan tetapi jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan Malaysia capaian ipm Indonesia masih cukup rendah.

Pengembangan sumber daya manusia dianggap penting oleh pemerintah Indonesia yang menjalankan misinya untuk melindungi rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kehidupan berbangsa, dan mendukung ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam alinea 4 UUD 1945. Menurut Ritonga (2014), pemerintah melakukan program dan kegiatan untuk membantu masyarakat di semua bidang pelayanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk mencapai tujuan negara, pemerintah Indonesia mengeluarkan anggaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan memperluas kesempatan kerja menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur ipm, maka bidang pendidikan dan kesehatan memiliki peran penting dalam penciptaan sumber daya dan pembangunan manusia. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan setidaknya dua bidang dalam hal meningkatkan kesempatan masyarakatnya untuk hidup sejahtera, yaitu bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

Menurut Mangkoesoebroto (2016), anggaran yang dikeluarkan di suatu bidang menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan

masalah di bidang tersebut. Pemerintah pusat menetapkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU-APBN) setiap tahun sebagai kebijakan fiskal dan komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan. Alokasi, distribusi, stabilitas, dan inamisatif adalah semua tugas yang dimiliki pemerintah, untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut pemerintah akan membelanjakan uang untuk pembangunan, pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dikenal sebagai belanja pembangunan salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi akan diperoleh melalui terpenuhinya kebutuhan dasar dan memiliki kemampuan untuk berkontribusi pada kemajuan teknologi lebih canggih yang dapat meningkatkan efisiensi produksi (Dumairy, 1999).

Dalam pembangunan ekonomi, pertumbuhan di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar modal manusia yang merupakan investasi jangka panjang. Selanjutnya, pencapaian tujuan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan dapat menghasilkan peningkatan kualitas dan produktivitas masyarakat, pertumbuhan produktivitas masyarakat merupakan motor penggerak (*engine of growth*) untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Rasidin dan Bonar, 2004). Pada dasarnya, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan adalah investasi dalam pembangunan manusia dan pengeluaran pemerintah merupakan jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai

salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 1.2**  
**Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan**  
**Tahun 2016-2020 (miliar)**

<b>Tahun</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Kesehatan</b>
2016	150 090.00	67 214.00
2017	143 134.00	61 724.00
2018	147 562.00	65 066.00
2019	152 690.00	62 758.00
2020	156 894.00	61 148.00

**Sumber : BPS. Badan Pusat Statistik. Diolah**

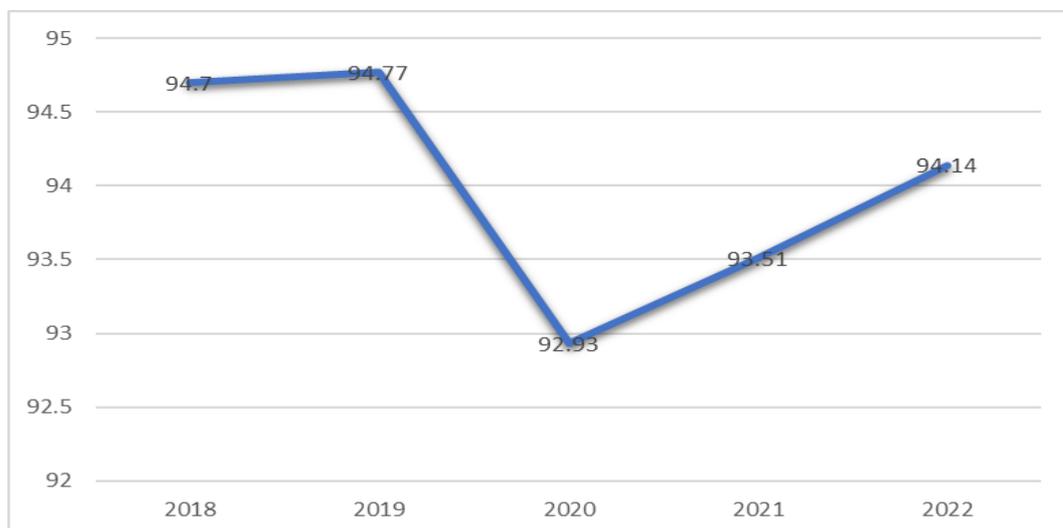
Berdasarkan tabel 1.2 pengeluaran pemerintah yang dialokasikan pada bidang pendidikan dan kesehatan memegang peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga dapat meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat. Namun, pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan masih belum maksimal, hal ini terlihat dari pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017-2018 pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mengalami peningkatan dari 143.134.00 menjadi 147.562.00 yaitu peningkatan sebesar 4 miliar akan tetapi pada tahun sebelumnya yaitu 2016-2017 terjadi penurunan sebesar 7 miliar dari 150.090.00 menjadi 143.134.00. Sedangkan pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan terus mengalami penurunan pada tahun 2016-2020, pada tahun 2016-2020 mengalami penurunan sebesar 6 miliar, pada tahun 2017-2018 sempat

mengalami peningkatan sebesar 4 miliar akan tetapi pada tahun selanjutnya terus menurun mengalami penurunan.

Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia telah meningkatkan keinginan masyarakatnya untuk hidup sejahtera. Namun, kenyataan saat ini adalah bahwa banyak masyarakat di Indonesia tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya. Kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan lebih sedikit kesempatan kerja yang pada akhirnya meningkatkan jumlah pengangguran, kemiskinan, dan menurunkan kualitas hidup, pekerjaan yang sangat mudah diganti dengan robot atau teknologi bantuan mesin juga lebih rentan terhadap pengangguran (Damelang & Otto, 2023). Untuk mencapai kesehatan ekonomi, telah lama dikatakan bahwa negara-negara perlu mengubah struktur dasar ekonomi mereka. Ini dianggap dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan dengan meningkatkan efisiensi teknis pasar dan lingkungan kelembagaan yang lebih luas atau dengan mengurangi hambatan yang menghalangi alokasi sumber daya yang efisien (Gokmen, Nannicini, Gaetano Onorato, & Papageorgiou, 2021).

Pemerintah membutuhkan manusia yang memiliki kualitas mumpuni untuk melakukan pembangunan. Sebagai subjek dan objek pembangunan, manusia juga merupakan objek pembangunan. Selain itu, analisis regional tentang pertumbuhan dan sumber daya manusia telah meningkat, selain studi spesifik negara (Nainggolan, Lie, Nainggolan, & Siregar, 2022). Selanjutnya, diharapkan bahwa modal dan investasi dapat meningkatkan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan dan kualitas hidup orang-orang yang hidup di dalamnya. Pertumbuhan ekonomi yang kuat berarti para pelaku ekonomi memiliki akses ke lebih banyak

produk dan layanan di semua sektor ekonomi dengan yakin bahwa kesejahteraan umum akan meningkat, karena peningkatan output di berbagai sektor ekonomi akan memberikan kesempatan kerja yang lebih luas dan berdampak pada pengangguran. Sudah jelas bahwa jenis analisis ini harus didasarkan pada pendekatan yang selalu berubah terhadap ekonomi kebijakan publik dalam lingkungan yang rumit dan tidak menentu (Stern, 2022). Dianggap sebagai salah satu syarat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang, kebijakan ekonomi yang dapat meningkatkan produksi harus diterapkan (Aliansyah & Hermawan, 2019).



**Gambar 1.3**

**Tingkat Kesempatan Kerja di Indonesia Tahun 2018-2022 (persen)**

*Sumber : BPS. Badan Pusat Statistik. Diolah*

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat terlihat bahwa nilai tingkat kesempatan kerja di Indonesia pada tahun 2018-2022 masih mengalami fluktuasi, penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2019 ke 2020 dimana nilai tingkat kesempatan kerja Indonesia menurun sebesar 1.84% menurunnya nilai tersebut

dikarenakan terjadinya pandemi *covid-19* yang menyebabkan banyak pekerja mengalami di PHK, tetapi pada tahun tahun berikutnya nilai tingkat kesempatan kerja di Indonesia mengalami peningkatan seperti pada tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan sebesar 0.58% selanjutnya dari tahun 2021 ke 2022 nilai tingkat kesempatan kerja meningkat sebesar 0.63%. maka dari itu perlunya tanggung jawab pemerintah untuk menaikkan tingkat kesempatan kerja karena apabila tingkat kesempatan kerja tinggi, maka kesempatan kerja pun tinggi, oleh karena itu, masyarakat mempunyai kesempatan untuk bekerja sehingga mendapatkan pendapatan dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya agar nilai ipm Indonesia bisa meningkat.

Pemerintah Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk memiliki kesempatan kerja. Kesempatan kerja sangat penting bagi masyarakat karena memberikan pendapatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Namun saat ini masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena pekerjaan yang tersedia biasanya terbatas. Hal ini akan menyebabkan perbedaan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja yang akan menyebabkan pengangguran. Salah satu kebutuhan pokok manusia (*Human Basic Needs*) sandang, pangan, dan papan, merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perekonomian suatu negara. Kesempatan kerja dapat menunjukkan seberapa banyak masyarakat suatu negara berkontribusi pada pembangunan ekonominya. Selain itu, indikator ini dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Peningkatan pendapatan

masyarakat akan dihasilkan dari peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang cepat (Sunariani, 2014).

Berdasarkan fenomena diatas sangat jelas bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, bidang kesehatan belum maksimal dan tingkat kesempatan kerja juga belum stabil masih mengalami fluktuasi, maka dari itu menarik untuk diteliti. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan judul penelitian “ Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2005-2023.”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Permasalahan pembangunan manusia di Indonesia adalah berkaitan dengan naik dan turunnya alokasi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan yang meningkat setiap tahunnya tidak sebanding dengan kenaikan pembangunan manusia yang tercermin dari nilai ipm Indonesia yang masih rendah. Selain itu, tingkat kesempatan juga masih tergolong rendah sehingga banyak masyarakat sedikit mendapatkan kesempatan kerja akhirnya mereka belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan fenomena pada latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan tingkat kesempatan kerja secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2005-2023?

2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan tingkat kesempatan kerja secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2005-2023?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada.

1. Menganalisis bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2005-2023.
2. Menganalisis bagaimana pengaruh tingkat kesempatan kerja secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2005-2023.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yaitu menjelaskan tentang kegunaan hasil penelitian bagi beberapa pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, manfaat penelitian yaitu untuk menyelidiki keadaan, alasan maupun konsekuensi terhadap keadaan tertentu.

1. Menambah pengetahuan pada studi ekonomi sumber daya manusia khususnya dalam hal peningkatan pembangunan manusia dan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan.

2. Memberikan informasi yang berguna bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan, serta hasil dari penelitian ini sebagai referensi atau acuan untuk pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Indonesia.

### **1.5.2 Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian adalah sebuah rancangan waktu atau jadwal yang terdiri dari daftar kegiatan atau aktivitas yang harus dilakukan dalam penelitian. Jadwal penelitian biasanya disertakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran kepada pihak yang berkepentingan tentang berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian tersebut.

**Tabel 1.3**  
**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	2023								2024															
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																							
2	Penyusunan Usulan Penelitian		■	■	■	■																			
3	Seminar Usulan Penelitian						■																		
4	Revisi Usulan Penelitian							■	■	■	■														
5	Penyusunan Skripsi											■	■	■	■	■	■	■	■	■					
6	Sidang Skripsi																					■			
7	Revisi Skripsi																						■	■	■